



TIGA KILO SABU YANG DIBUNGKUS DALAM KEMASAN TEH CINA DIMUSNAHKAN

BACA HALAMAN 2



GANGGU KESELAMATAN PENERBANGAN, DISHUB ENGGAN PASANG PJU DI DEPAN BANDARA JUWATA

BACA HALAMAN 8



Pemusnahan Sabu dengan cara dilarutkan dalam ember, kemudian dibuang ke kloset.

Tiga Kilo Sabu yang Dibungkus dalam Kemasan Teh Cina Dimusnahkan

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Utara (Kaltara), membekuk 14 tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, diamankan barang bukti narkotika jenis sabu, akumulasinya seberat 3 kilo, yang dikemas dalam bungkus teh cina.

Adapun 14 tersangka yang diamankan, berdasarkan tiga laporan polisi (LP). Pertama, pada 3 Oktober 2023, Kepolisian membekuk 9 tersangka yang merupakan jaringan Internasional Tawau Malaysia yang

dikirimkan melalui Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Sembilan tersangka itu, diantaranya inisial O, M, AA, JM, IW, A, MS, MD, dan, MR. Sedangkan, LP kedua, pada 02 November 2023, tersangka diamankan di Kota Tarakan inisial A, S, O dan G.

Sedangkan LP ketiga, pada 06 November 2023, di perbatasan Kaltara-Kaltim, dengan tersangka inisial MY.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya melalui Ditresnarkoba Kombes Pol Agus Yulianto menyampaikan dari 14 tersangka yang dia-

mankan memiliki peran berbeda ada yang bertugas sebagai kurir dan juga bandar. Modusnya, menggunakan jaringan terputus.

“Wilayah Kaltara dijadikan lintasan, sabu tersebut hendak dikirimkan ke Sulawesi,” tukasnya.

Selanjutnya, sabu tersebut dimusnahkan dengan cara larutkan dalam wadah, kemudian di buang ke kloset. Disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Bulungan, Pengadilan, dan Dinas Kesehatan. (tin/and)

Editor: Andhika



Awal Tahun 2024, Pelabuhan Ferry Ancam Ditargetkan Beroperasi

TANJUNG SELOR – Kabar baik bagi warga Kabupaten Bulungan. Bahwa Pelabuhan Ferry Ancam Desa Ardi Mulyo ke Tarakan diperkirakan beroperasi pada awal tahun 2024. Kepastian itu, disampaikan oleh Bupati Bulungan, Syarwani setelah dilakukan peninjauan lapangan beberapa waktu lalu.

Sebelum beroperasi, pemkab Bulungan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara. Termasuk pihak Ferry selaku pengguna pelabuhan. Diungkapkan Syarwani, bahwa beberapa infrastruktur pelengkap masih akan dikerjakan oleh pemerintah daerah.

“Insya Allah tahun 2024 sudah masuk pemancangan tambatan Kapal Ferry Ancam,” ucap Syarwani, Jumat (17/11/2023).

Penataan dan pembenahan fasilitas pendukung di Pelabuhan Ferry Ancam, kata Syarwani mengoptimalkan anggaran di tahun 2024. Penataan dimaksud, seperti pembenahan akses jalan masuk ke Pelabuhan dan alur bongkar muat. “Termasuk jaringan listrik hingga masuk ke Pelabuhan,” tutur Syarwani.

Hasil masukan masyarakat, Sambung Syarwani, mereka menginginkan adanya ketersediaan jaringan listrik, dan perbaikan akses jalan masuk.

“Saya dapat masukan dari Kepala Desa untuk jaringan listrik hingga ke Dermaga Ferry. Sebelumnya, di dermaga ini hanya menggunakan lampu seadanya, saat bongkar muat barang pada malam hari,” ucapnya.

Surat masuk disampaikan oleh Camat dan Kepala Desa telah diterima oleh Pemkab Bulungan. Surat itu, berupa usulan masuknya jaringan listrik di Dermaga Pelabuhan Ferry

Ancam, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara.

“Kita telah berkoordinasi dengan pihak PLN, terkait dengan percepatan sambungan listrik itu,” tuturnya.

Bupati menargetkan, Januari 2024 mendatang jika tidak ada halangan Kapal Ferry rute Tarakan- Ancam kembali beroperasi. “Ini sambil kita siapkan syarat yang diminta mereka (Ferry) 1 buah titik pancang untuk tambat supaya mereka aman saat bongkar muat,” jelasnya.

Sebagai informasi, Sungai Ancam

saat air pasang memiliki kedalaman rata-rata 7 meter. Bahkan, saat air surut masih dapat digunakan sebagai tempat bongkar muat kapal Bahan Bakar Minyak (BBM) perusahaan berbobot 100 ton.

Bupati menambahkan, secara perlahan Dermaga Pelabuhan Ferry Ancam akan dibangun. Termasuk, jika memungkinkan bakal disediakan lahan pergudangan atau tempat penyimpanan peti kemas, termasuk penyiapan tenaga kerja bongkar muat. (adv/tin/and)





Logistik Pemilu 2024 Sebagian besar sudah tiba di Gudang KPU Bulungan.

Logistik Pemilu Sebagian Besar Sudah Tiba di Bulungan

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, memastikan distribusi logistik pemilu hampir sebagian besar sudah tiba di Tanjung Selor, Bulungan.

Logistik pemilu tersebut distribusi langsung dari Pusat hingga ke daerah, di Bulungan logistik tersebut langsung diturunkan melalui Gudang KPU.

Komisioner KPU Bulungan, Mistang saat dikonfirmasi mengatakan, logistik pemilu tahun 2024 hampir sebagian besar sudah tiba di Bulungan, yang belum masuk hanya menunggu spidol, dan surat suara.

Hal itu dia ungkapkan, sesaat setelah logistik baru datang pada Kamis (16/11/2023) kemarin. "Iya, hari ini (kemarin red) sudah datang logistik berupa bilik suara. Logistik pemilu yang sudah tiba di Bulungan berupa kotak suara, bilik suara, segel keretas, tinta dan kabel tis," ungkap Mistang, Jumat (17/11/2023).

Setelah logistik tiba, langsung dilakukan pengecekan dan perhitungan di Gudang KPU Bulungan, Jalan Jelarai. Perhitungan logistik pemilu, kata Mistang melibatkan beberapa pihak di antaranya sekretariat KPU dan

juga petugas gudang.

"Petugas gudang ini adalah mereka yang dipekerjakan oleh KPU, untuk menjaga dan mengawasi gudang," tukasnya.

Gudang logistik pemilu berempat di Domescenter berdekatan dengan kantor Kecamatan Tanjung Selor. Petugas yang menjaga gudang logistik ada empat orang dan menjalankan tugas secara bergantian.

"Selain itu, kita juga dibantu oleh aparat kepolisian. Dalam hal ini Polresta Bulungan untuk pengawalan di sana," tukasnya.

Dia melanjutkan, logistik yang belum tiba seperti spidol dan surat suara. “Jika dilihat yang ada saat ini, hampir sebagian besar logistik pemilu sudah datang,” bebernya.

Distribusi logistik pemilu 2024, kata dia menggunakan pihak ketiga dalam hal ini perusahaan. “Distribusi logistik pemilu sesuai tahapan, memang harus semua rampung pada bulan November 2023, distribusi logistik tersebut tiba dalam waktu berbeda. Prosesnya masih berjalan dan kita menunggu,” ulasnya.

“InsyaAllah sebelum tanggal 28 November 2023, kemungkinan logistik pemilu bisa datang semua di Bulungan. Kita memiliki waktu satu bulan lebih untuk proses pelipatan, sortir kemudian dimasukkan dalam kotak suara, sampai dengan proses distribusi ke tiap TPS,” tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika





Eks Manager Perusda Berdikari jalani pemeriksaan di Kejari Bulungan selama 20 hari kedepan.

Tersangka AJP dan SF Diperiksa, dari Tangan AJP Penyelidik Sita Uang Rp 50 Juta

TANJUNG SELOR - Kasus penyelewengan anggaran dalam jabatan, dengan tersangka SF dan AJP yang merupakan manager Perusahaan Daerah (Perusda) Berdikari, memasuki tahap dua, berupa penyerahan tersangka dan barang bukti.

Diwartakan sebelumnya, kedua tersangka diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan, Hardijono Sidayat saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya telah menerima barang bukti dan tersangka kasus tindak pidana korupsi, dari penyelidik kepolisian Polresta Bulungan.

Kedua tersangka yang diamankan, masing-masing inisial AJP dan FM. Akibat perbuatannya, keduanya dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 juncto pasal 19 ayat

1 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

"Pasal yang dipersangkakan mengenai tindak pidana korupsi, selanjutnya akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih," ucapnya, Jumat (17/11/2023).

Kedua tersangka dilakukan penahanan, guna untuk kepentingan proses persidangan sehingga lebih cepat. "Makanya kita lakukan penahanan pada sore hari ini," tuturnya.

Masa penahanan, kata dia dimungkinkan dapat dilakukan perpanjangan. Karena ancaman pidananya

diatas lima tahun. Adapun, barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sekitar 50 juta, satu unit mesin, nota atau kwitansi pembelian dari Perusda.

Dari hasil pemeriksaan berkas perkara, kata dia belum ditemukan adanya keterlibatan tersangka lain, selain dari kedua orang yang telah dilakukan penahanan.

"Saat ini masih menjurus kepada dua tersangka ini," tuturnya.

Adapun, barang bukti uang tunai tersebut, sifatnya bukan pengembalian tapi barang bukti yang dirampas oleh penyelidik, yang bersumber dari tersangka AJP. Saat pemeriksaan berlangsung, kedua tersangka menggunakan baju tahanan berwarna orange. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Tampang pelaku pencurian saat ditampilkan dalam pers rilis di Mapolres Tarakan.

Demi Beli Sabu, Pria di Tarakan Curi 4 Unit Base Band BTS di Tower Milik Telkomsel

TARAKAN - Seorang pria berinisial EC (24) ditangkap Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tarakan lantaran melakukan pencurian Base Band BTS di Tower milik Telkomsel. Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Randhya Sakthika Putra mengatakan, terungkapnya kasus pencurian ini bermula dari laporan salah seorang pegawai Telkomsel yang menyadari bahwa Base Band di tower telah hilang.

"Kemudian langsung melaporkan ke Polres Tarakan," ucap Randhya, saat pers rilis di Mapolres Tarakan, Kamis, (16/11/2023).

Setelah mendapatkan informasi dari pelapor, personel Satreskrim bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah temannya di kawasan Beringin, Tarakan

Tengah, pada Kamis, (9/11/2023).

"Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan didapatkan pelaku seorang laki-laki berinisial EC," jelas nya.

Randhya mengungkapkan, pelaku merupakan mantan pekerja salah satu pengelola (vendor) Tower BTS di Tarakan, dia menjalankan aksinya seorang diri. Terungkap pula, pelaku melakukan pencurian Base Band BTS di 4 lokasi berbeda selama kurun waktu satu pekan.

Pencurian pertama, terjadi pada 1 November 2023 di jalan Flamboya. Kemudian 4 November di Kampung 6, lalu 6 November di jalan Mularman. Dan terakhir, pada 7 November di jalan sungai Ngingitan. "Pelaku jualnya dengan harga Rp1,3 juta. Adapun tujuan pengirimannya adalah ke DKI Jakarta, Jawa Barat dan

Jawa Tengah, dimana sebelumnya pelaku menawarkan di aplikasi Facebook dan grup WA," lanjut Randhya.

Dari pengakuan pelaku kepada polisi, hasil dari penjualan barang curian tersebut digunakannya untuk berfoya-foya dan memberi sabu. "Hasil dari penjualan tersebut pelaku gunakan untuk keperluan sehari-hari, bermain slot (judi) dan membelisabu," jelas Kasatreskrim lagi.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tarakan. "Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara" pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Suasana jalan di depan Bandara Juwata yang masih tampak gelap.

Ganggu Keselamatan Penerbangan, Dishub Enggan Pasang PJU di Depan Bandara Juwata

TARAKAN - Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Aki Balak tepatnya di depan Bandara Internasional Juwata Tarakan dikeluhkan warga. Hal itu lantaran rawannya kecelakaan akibat minimnya penerangan jalan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tarakan pun buka suara mengapa enggan memasang PJU terlalu terang di depan landasan pesawat, Bandara Juwata Tarakan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Sukarman mengungkapkan pihaknya sudah menyurat kepada Otoritas Bandara (Otban) Balikpapan untuk memasang PJU.

Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengganggu keselamatan penerbangan.

"Artinya lebih mementingkan keselamatan penerbangan makanya tahun ini kita pasang dari simpang Lanud ke arah sana (arah STM)," ujar Sukarman, belum lama ini.

Pemasangan tersebut baru dilakukan di empat titik. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Otoritas Bandara terkait bagaimana solusi kedepannya mengingat penggunaan jalan pun membutuhkan keamanan.

Sukarman tak menampik di sekitar area jalan tersebut sangat berbahaya untuk penggunaan jalan karena kondisinya sangat gelap dan banyak memakan korban akibat kecelakaan

yang terjadi. "Saya sendiri merasa, malam itu gelap sekali kalau lewat," imbuhnya.

Dia pun akan terus berkoordinasi karena menurutnya di kota-kota besar bisa saja di pasang namun, karena ada ketentuan yang harus diikuti pihak Otban sehingga pihaknya tidak berani mengambil tindakan. Dengan adanya ketentuan tersebut pihaknya pun tidak dapat berbuat apa-apa.

"Mungkin ada ketentuannya, namanya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Ada jarak dan ketinggian yang diperkankan," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia
Editor: Andhika

Koran DIGITAL

SABTU, 18 NOVEMBER 2023



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



SERUNYA PUNCAK HKN KE-59 DI KALTIM

BACA HALAMAN 2



**PROGRAM WOLBACHIA
BERBAHAYA? BEGINI TANGGAPAN
KADINKES BONTANG**

BACA HALAMAN 35-36



Puncak dari peringatan HKN ke-59 ditutup dengan kegiatan jalan sehat dan gowes.

Serunya Puncak HKN Ke-59 di Kaltim

SAMARINDA- Puncak dari peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan jalan sehat dan gowes di Gelora Kadrie Oening (GOR Sempaja) Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, peringatan HKN ke-59 ini diharapkan dapat membangun semangat dan tekad untuk terus berjuang bersama menyelamatkan bangsa.

"HKN ke-59 ini mengangkat tema "Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju". Tema ini dipilih untuk

menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat," terang Jaya, Sabtu (18/11/2023).

Lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, praktisi dan media massa turut ambil bagian dalam peringatan HKN guna mendukung pembangunan kesehatan.

"Masyarakat semakin mengerti arti penting perilaku dan lingkungan sehat serta mau melakukan gerakan hidup sehat di tatanan keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas lainnya," tuturnya.

Diketahui, rangkaian kegiatan peringatan HKN ke-59 digelar sejak tanggal 13 November 2023, dengan menggelar upacara. Pada tanggal 14 November 2023 mengadakan seminar kesehatan, dan di tanggal 15 November 2023 mengadakan lomba kreasi senam peregangan dan lomba PMT balita. Kemudian tanggal 16-17 November 2023 mengadakan lomba karaoke antar OPD, terakhir puncak peringatan HKN ke-59 menggelar jalan sehat dan gowes. (ADV/nta)

Pewartu : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*



SUKSES GELAR ORIENTASI 360 GURU PPPK



SUKSES GELAR ORIENTASI 360 GURU PPPK

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda secara resmi mengakhiri kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I dan II Angkatan 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, dan 89 di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim kelas kota Samarinda.

Acara penutupan digelar di aula serbaguna BPSDM Kaltim, Jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Hadir pada acara penutupan tersebut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional (PPKMF) BPSDM Kaltim, Rina

Kusharyanti, Widyaswara BPSDM Kaltim, Sekretaris BKPSDM Kota Samarinda, Samlian Noor, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda, Himawan, dan para peserta guru PPPK dari Samarinda.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda, Himawan, mengatakan bahwa kegiatan orientasi tersebut berlangsung mulai tanggal 9 - 27 Oktober 2023. Orientasi PPPK kali ini terdiri dari dua gelombang, yakni gelombang I diikuti oleh 160 guru dari Angkatan 81 hingga Angkatan 84, masing-masing 40 orang setiap angkatan. Sementara itu, gelombang II diikuti oleh 200 guru dari Angkatan 85 hingga Angkatan 88, masing-masing 40

orang setiap angkatan.

"Kegiatan Orientasi PPPK ini diikuti oleh 160 orang gelombang 1 dan 200 orang di gelombang 2, jadi total yang mengikuti orientasi 360 orang," ujarnya.

Orientasi PPPK ini berlangsung selama 18 hari, terdiri dari 15 hari kegiatan online (MOOC) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan 3 hari kegiatan tatap muka yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan penutupan oleh Samlian Noor selaku Sekretaris BKPSDM Kota Samarinda. **(Adv/BPSDM KALTIM/Hanafi)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Nicha Ratnasari



Kabid PKMF-BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

BPSDM KALTIM BANTU ASN PAHAMI MANAJEMEN RISIKO DIGITAL LEWAT WEBINAR

SAMARINDA - Demi menambah pengetahuan ASN tentang Manajemen Risiko Digital, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengadakan sebuah webinar dengan tema "Digital Risk Management" yang akan diadakan secara online pada Kamis, 16 November 2023, pukul 09.30 Wita.

Acara ini akan mengundang Vice President Head of Security Strategy and Architecture PT Indosat Ooredoo Hutchison, Raditio Ghifiardi sebagai narasumber.

Kabid PKMF-BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, mengatakan narasumber yang diundang adalah seorang ahli dalam bidang keamanan dan strategi digital. Dalam webinar ini, beliau akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang manajemen risiko digital.

"Kita mengundang Bapak Raditio Ghifiardi,

beliau adalah pakar digital risk management, yang berbagi ilmu kepada kita," ungkapnya.

Webinar ini juga akan dipandu oleh dr. Herawaty dari Widyaswara Ahli Madya BPSDM Kaltim yang juga merupakan seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Rina berharap acara webinar ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko digital kepada peserta yang hadir. Bagi mereka yang tertarik untuk mengikuti webinar ini, dapat masuk melalui link Zoom Meeting dari berita Mediakaltim.com yang telah terbit sebelumnya.

"Para peserta yang telah mengikuti melalui aplikasi zoom akan mendapatkan E-Sertifikat yang akan di kirimkan melalui email pribadi peserta," tutup Rina. **(ADV/BPSDMKaltim/Han)**

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari



Bayu Zailani, Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat menyampaikan kesan-kesan saat menjalani orientasi selama 3 hari di BPSDM Kaltim.

PESERTA ORIENTASI PPPK DI KOTA SAMARINDA TERBANTU DIBIMBING PEMATERI YANG BERKOMPETEN

SAMARINDA - Peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Samarinda merasa puas dengan pelatihan yang diikuti.

Salah satu peserta, Bayu Zailani, mengungkapkan rasa senangnya setelah mengikuti Orientasi PPPK Gelombang I dan II Angkatan 81-89 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kelas Kota Samarinda, yang digelar selama 3 hari mulai dari 13-15 November 2023 di kompleks pelatihan BPSDM Kaltim.

Menurut Bayu, pemateri yang dihadirkan sangat berkompeten dan panitia memberikan pelayanan 24 jam yang memuaskan. Meskipun awalnya merasa ragu, fasilitas dan pelayanan dari BPSDM Kaltim dinilai sangat luar biasa.

"Awalnya ragu waktu mau orientasi di sini. Setelah mengikuti, eh kok fasilitasnya bagus dan tenaga pengajarnya juga berkompeten sekali," ungkap Guru SMPN 35 Samarinda ini.

Dari pelatihan ini, para peserta mendapat-

kan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa digunakan di sekolah. Mereka berharap bukan hanya momentum biasa saja mengikuti orientasi. Tetapi dapat membentuk mereka menjadi ASN PPPK yang berakhlak baik.

"Semoga setelah ini kami bisa menjadi ASN yang berakhlak, sesuai dengan amanat Presiden kita. Semoga juga kita menjadi lebih baik setelah ini," tutur Guru Bahasa Inggris ini.

Diketahui, Orientasi PPPK ini terselenggara atas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda.

Diharapkan, pelatihan ini dapat membantu para peserta menjadi ASN PPPK yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (adv/

BPSDMKaltim/Han)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Sekretaris BKPSDM Kota Samarinda, Drs. Samlian Noor, M.Si, saat memberikan sambutan pada acara penutupan Orientasi PPPK kelas samarinda pada rabu (15/11/2023) di aula BPSDM Kaltim.

ORIENTASI PPPK BENTUK UPAYA PEMERINTAH CIPTAKAN SDM TENAGA PENDIDIKAN BERKUALITAS DI KOTA SAMARINDA

SAMARINDA - Sekretaris BKPSDM Kota Samarinda, Samlian Noor menyampaikan bahwa Orientasi PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika Aparat Sipil Negara (ASN) PPPK yang mayoritas adalah tenaga pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda.

Hal itu diungkapkan dalam sambutannya pada acara penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Serbaguna mBPSDM Kaltim, pada Rabu (15/11/2023),

Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan masyarakat.

"Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula, sehingga

perlu dilakukan perubahan dan peningkatan kualitas seorang pendidik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Samarinda," terang Samlian.

Samlian juga mengingatkan agar PPPK dapat dibina untuk memberikan brainstorming dan mengasah pemikiran, serta tidak selalu menuntut hak tanpa melakukan kewajiban.

"Melalui Orientasi PPPK, para pendidik diharapkan dapat memperoleh pengalaman yang dapat dikonstruksi dan diterapkan dalam hal-hal tertentu yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga diperlukan partisipasi secara aktif serta pengembangan kompetensi untuk memperoleh pengetahuan," tutupnya. **(Adv/BPSDMKaltim/han)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Tampilan layar Zoom meeting, saat acara Webinar BPSDM Kaltim. Kepala BPSDM Kaltim, Dra Nina Dewi MAP saat membrikan sambutan sekaligus membuka acara.

Webinar BPSDM Kaltim Soal Digital Risk Management Diikuti Ratusan Peserta

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sukses melaksanakan webinar dengan tema "Digital Risk Management" yang diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum.

Acara webinar ini dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Zoom meeting dan YouTube BPSDM Kaltim, pada Kamis (16/11/2023) pukul 09.00 Wita dan dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi.

Dalam sambutannya, Nina Dewi mengatakan bahwa webinar ini adalah wujud komitmen BPSDM

Kaltim dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengetahuan ASN dan masyarakat umum.

"Saya berharap semua peserta dapat mengikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh agar mampu menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh narasumber," terang Nina Dewi.

Webinar ini dipandu oleh Hernawaty dari Widyaswara Ahli Madya BPSDM Kaltim dan narasumber yang diundang adalah seorang ahli dalam bidang keamanan dan strategi digital, Raditio Ghifiardi.

"Setiap peserta yang mengikuti acara webinar ini melalui aplikasi Zoom Meet-

ing akan diberikan e-sertifikat yang akan dikirim ke email pribadi peserta masing-masing," Terangnya.

Diharapkan, webinar ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi para peserta. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.

"Semoga dalam webinar ini kita dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN dan masyarakat umum dalam menghadapi era digital saat ini," pungkasnya. **(Adv/BPSDM-Kaltim/Han)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti S.STP., MM. Saat menyampaikan laporan panitia acara.

PELATIHAN JFAK BPSDM KALTIM BERHASIL TINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

SAMARINDA – Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) BPSDM Kaltim telah sukses diselenggarakan pada Jumat (11/11/2023) di Hotel Fugo Jalan Untung Surapati, Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Acara penutupan dihadiri oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi dan diawali dengan laporan dari panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti.

Pelatihan JFAK BPSDM Kaltim diikuti oleh 31 peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kaltim. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan membantu dalam

pengembangan kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan berbasis pada bukti.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh.

“Saya berharap agar semua peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh setelah kembali bekerja di tempat kerja masing-masing daerah,” pintanya.

Laporan dari panitia penyelenggara menunjukkan bahwa pelatihan JFAK BPSDM Kaltim berjalan dengan sukses dan lancar. Peserta pelatihan memberikan banyak masukan positif terkait materi dan

metode yang diberikan dalam pelatihan ini.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan JFAK BPSDM Kaltim telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan membantu pengembangan kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan berbasis pada bukti.

Acara penutupan berakhir dengan harapan agar pelatihan JFAK BPSDM Kaltim dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan inovatif di daerah masing-masing. “Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam pelatihan ini,” tutupnya. **(ADV/BPSDM-kaltim/Han)**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim Dra Nina Dewi MAP, saat memberikan sambutan sekaligus menutup acara pelatihan JFAK Tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kaltim

PESERTA JFAK 2023 DIHARAP MILIKI KOMPETENSI DAN KETERAMPILAN YANG DIBUTUHKAN

SAMARINDA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) 2023 Tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kaltim memiliki kompetensi, keterampilan serta karakteristik pengetahuan yang diperlukan dalam tugas jabatannya.

Hal ini disampaikan oleh Nina Dewi saat memberikan sambutan sekaligus menutup acara pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) tahun 2023 yang digelar oleh (BPSDM) Provinsi Kaltim, pada Jumat (11/11/2023) di Hotel Fugo Jalan Untung Surapati, Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

“Saya berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) 2023 memiliki kom-

petensi, keterampilan, serta karakteristik pengetahuan yang diperlukan dalam tugas jabatannya,” ujar Nina Dewi.

Nina Dewi juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kaltim sangat mendukung program pelatihan seperti JFAK BPSDM Kaltim dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia berharap program-program pelatihan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh aparatur pemerintah di Kaltim.

“Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan semangat seluruh peserta dalam mengikuti pelatihan JFAK BPSDM Kaltim. Harapan kami ke depannya agar pelatihan JFAK BPSDM Kaltim dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan inovatif di daerah masing-masing” tutupnya. **(ADV/BPSDM-kaltim/Han)**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dra. Nina Dewi, M.AP, saat menyampaikan sambutan pada penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

ASN HARUS MAMPU KEMBANGKAN INOVASI SETELAH PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

SAMARINDA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dra. Nina Dewi, M.AP, baru-baru ini memberikan sambutan pada acara penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 18 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Acara tersebut berlangsung di aula utama kantor BPSDM Kaltim di Jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Dra. Nina Dewi mengucapkan terima kasih kepada para peserta PKP yang telah menyelesaikan pelatihan dan memberikan inovasi terbaik yang

dituangkan dan diimplementasikan dalam laporan Aksi Perubahan. Ia berharap inovasi yang telah diberikan oleh para peserta dapat berkesinambungan dan memberikan dampak yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Dra. Nina Dewi juga menekankan bahwa inovasi-inovasi yang diberikan oleh para peserta pelatihan tidak hanya sebagai pemenuhan syarat dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan, tetapi juga sebagai gerbang pembuka semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada masyarakat.

“Dalam kesempatan ini, saya

berharap para peserta dapat terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” harapnya.

Acara penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 18 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.

“Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintahan,” tutupnya. **(ADV/BPSDM-kaltim/Han)**



Brosur Webinar "Digital Risk Management" untuk Tingkatkan Kompetensi ASN, BPSDM Kaltim

BPSDM KALTIM GELAR WEBINAR "DIGITAL RISK MANAGEMENT" UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur akan kembali mengadakan Webinar dengan tema "Digital Risk Management" pada Kamis, 16 November 2023 pukul 09.30 Wita.

Webinar ini diadakan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, webinar ini akan digelar secara terbuka dan akan diikuti oleh ASN dari Kaltim dan luar Kaltim melalui aplikasi zoom meeting, untuk masyarakat umum bisa menyaksikan secara live di Kanal YouTube milik BPSDM Kaltim.

Webinar ini diselenggarakan

oleh Panitia Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Kabid PKMF-BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

Dalam webinar ini, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan video, rename dengan format "INSTANSI_NAMA", menggunakan virtual background, dan mengunduh virtual background melalui link yang telah disediakan. Peserta yang tidak melaksanakan peraturan tersebut akan dikeluarkan dari meeting Zoom.

Diharapkan, webinar ini dapat

memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi para peserta, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.

Berikut adalah link zoom meeting untuk ASN Join Zoom Meeting <https://us02web.zoom.us/j/8381107674?pwd=KzRxZHBYSUxVMlFVYVgxZXk1WEdnQT09>

Meeting ID: 838 110 7674
Passcode: bpsdm **(ADV/BPSDM-KALTIM/Han)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)

Rp Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Rp. 10.532,27



Harga Kernel

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim @disbun.kaltimprov.go.id

KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Minggu Ke I
BULAN:
November 2023

SIPASBUN
SISTEM INFORMASI PASAR PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEK/ PENGUMPUL	Indikasi Karet K3 100%	Rp.22.750/kg
Karet	Rp.9.900 /kg K3 50-55%	Rp.12.700/Kilo	Indikasi Karet K3 85%	Rp.19.337/kg
Lada Putih	Rp.55.000 /kg	Rp.97.000 /kg	Indikasi Karet K3 50%	Rp.9.668/kg
Kelapa Tua	Rp.5.700 / hj	Rp.2.200 / hj	TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Pekebun Bermitra Periode II (16 sd 30) bulan Oktober 2023 Berdasarkan Umur Tanaman	
Kelapa Muda	Rp.8.700 / hj	Rp.9.500 / hj	Harga TBS Umur >10 Thn Rp.2.174,5/kg Naik Rp.17,8 atau 0,8% dari periode sebelumnya	
Biji Kakao	Rp.28.000 / kg	Rp.32.000 / kg		
Gula Merah Aren	Rp.28.800 / kg	Rp.30.200 / kg		

HARGA RATA-RATA KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

BerAKHLAK
berorientasi Pelayanan & tunjukkan Kompetensi
harmoni loyal & aktif kolaborasi

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INFORMASI HARGA
INDIKASI KARET
Tanggal 10 November 2023

Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)

Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesian Rubber (SIR20)

Harga SICOM hari ini : 147,8 US Cent
Kurs Rupiah Kisaran : Rp.15.551
Harga Dasar / FOB : Rp.22.984 X 85%
RP.19.536 TURUN 0,2%

KONDISI KARET

Harga Jalan Pabrikasi K3 100%	Rp. 18.000 - Rp.19.000
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEDIH K3 70% - 75%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 65% - 69%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPB K3 60% - 64%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI / UPPB K3 55% - 59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50% - 54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
HARGA KARET DASAH TINGKAT PETANI K3 45% - 49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
HARGA KARET DASAH TINGKAT PETANI K3 40% - 44% (DARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.600

BerAKHLAK
berorientasi Pelayanan & tunjukkan Kompetensi
harmoni loyal & aktif kolaborasi



Disbun Kaltim Bersama Dewan Pakar Bahas Ranpergub Soal Tata Cara Pengolahan Hasil Perkebunan

SAMARINDA - Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang "Tata Cara Pengolahan Hasil Perkebunan" bersama dengan beberapa Dewan Pakar Pertanian dan Perkebunan Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Ahmad Muzakkir menerangkan maksud dari pengolahan hasil perkebunan serta optimalisasi hasil yang bakal diperoleh para Pekebun di Kaltim.

"Pengolahan hasil perkebunan yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ada dalam memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi," terang Muzakkir, Jumat (27/10).

Dirinya menambahkan, Ranpergub yang tengah dibicarakannya bersama para dewan pakar itu bakal menjadi petunjuk lengkap bagi para pelaku usaha perkebunan di Bumi Etam.

"Rancangan Peraturan Gubernur yang sedang kita susun dimaksudkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan prinsip-prinsip penanganan panen, pascapanen, dan tata cara pengolahan hasil perkebunan yang baik," terang Ahmad Muzakkir

la menambahkan tujuan dari rancangan peraturan tersebut agar setiap bentuk pengolahan perkebunan di Kaltim memiliki landasan hukum yang kuat sebagai pencegahan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Lebih jauh, Muzakkir mengemukakan rancangan tersebut memberi jaminan bahan baku dengan kualitas tinggi yang diproduksi di Benua Etam.

"Tujuan yang ingin kita capai ada-

lah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tata cara pengolahan hasil perkebunan. Demikian juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tata cara pengolahan hasil perkebunan," tandas Muzakkir.

Tentunya kata Muzakkir, untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan hasil perkebunan dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku yang berasal dari Pekebun di Provinsi Kaltim

"Akan ada tata cara bagaimana mendorong Pekebun untuk menerapkan manajemen ekonomi rumah tangga yang efisien untuk kelangsungan usaha perkebunannya," tuturnya.

Diketahui, secara intens dewan pakar mendampingi dalam proses yang telah berjalan, dan menjadi bagian dalam penyusunan Ranpergub tersebut. (ADV/MK)



Disbun Kaltim Targetkan Capai 90 IKM pada Semester Akhir 2023

SAMARINDA - Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan nilai 90 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada semester akhir 2023. Hal itu diungkapkan Sekretaris Disbun, Surono kepada mediakaltim, Selasa (31/10/2023). Target tersebut naik dari capaian mereka pada semester pertama 2023 yakni 86,13 IKM.

Surono menjelaskan dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, itu sejalan dengan tugas ASN yakni memberikan pelayanan terbaik kepada publik. "Jadi fungsi ASN itu ada tiga. Selain memberikan pelayanan publik, juga sebagai pelaksana kebijakan dan pemersatu bangsa," kata Surono.

Sekretaris Disbun itu menjelaskan ada sembilan indikator penilaian publik menurut Kemenpan RB. Sembilan indikator itu adalah persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan terakhir penanganan pengaduan, saran dan masukan.

"Indikator penilaian kami itu berdasarkan Permenpan RB no 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat," jelas Surono.

Surono juga menjelaskan, cara pengambilan penilaian indikator pelayanan publik dilakukan dengan dua cara. Yakni online dan offline. Pada cara online, Disbun menyebarkan kuisioner kepada masyarakat di daerah-daerah yang mendapatkan pelayanan dari Disbun melalui online.

Setelah itu, ada juga pengambilan kuisioner melalui offline. "Jadi saat kami melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, usai kegiatan kami membagikan kuisioner untuk mereka isi," urainya.

Untuk itu, Disbun Kaltim yakin, tingkat kepuasan publik dapat meningkat hingga 90 IKM. "Kami selalu melakukan perbaikan di sektor pelayanan. Untuk itu, kami optimis tingkat kepercayaan publik terhadap kami meningkatkan," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Disbun Kaltim

menggelar Bimbingan Teknis kepuasan publik kepada pegawai mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam bimtek, pegawai Disbun diberikan arahan cara melayani masyarakat dengan baik serta menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Disbun. (ADV)



Sekretaris Disbun, Surono



Harga TBS Kelapa Sawit di Kaltim Naik Signifikan pada Oktober 2023

SAMARINDA - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Prov Kaltim) mengeluarkan surat keputusan penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun yang bermitra di Kaltim periode II (16 hingga 31 Oktober 2023), Selasa (31/10).

Dalam pembahasan penetapan harga TBS, juga dihadiri oleh Direktorat PPHP Ditjenbun Kementan RI, guna memantau proses penetapannya, dan akan melakukan pemantauan penerapannya pada pekebun yang sudah bermitra.

Dalam kesempatan ini, Kepala Disbun Kaltim, Ahmad Muzakkir, meminta agar seluruh komponen pekebun bersama-sama melakukan pengawasan penerapan harga di lapangan untuk TBS pekebun yang bermitra. "Laporkan ke Disbun, akan kita tindak sesuai ketentuan," tegasnya.

Dalam keputusan tersebut, TBS kelapa sawit di Provinsi Kaltim periode 16-31 Oktober 2023 mengala-

mi kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit, dengan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 tahun sebesar Rp2.174,53 per kilogram.

Di mana pada periode sebelumnya, 1-15 Oktober 2023, harga TBS kelapa sawit di Kaltim untuk umur 10 tahun ditetapkan dengan harga Rp2.156,75 per kilogram. Artinya, dalam periode 16-31 Oktober 2023, jumlah kenaikan untuk kelompok umur 10 tahun ke atas mencapai Rp17,78.

Adapun rincian harga TBS bagi pekebun yang telah bermitra dengan pabrik sawit periode 16-31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. TBS yang dipanen dari pohon umur 3 tahun dengan harga Rp1.917,85 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp1.902,09.
2. TBS yang dipanen dari pohon umur 4 tahun dengan harga Rp2.049,33 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang se-

besar Rp2.032,39.

3. TBS yang dipanen dari pohon umur 5 tahun dengan harga Rp2.058,14 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.041,21.
4. TBS yang dipanen dari pohon umur 6 tahun naik menjadi Rp2.079,43 dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.062,35.
5. TBS yang dipanen dari pohon umur 7 tahun dengan harga Rp2.091,39 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.074,23.
6. TBS yang dipanen dari pohon umur 8 tahun sebesar Rp2.107,53 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.090,23.
7. Sedangkan TBS yang dipanen dari pohon umur 9 tahun dengan harga Rp2.149,04 naik dibandingkan dengan periode 1-15 Oktober 2023, yang seharga Rp2.131,47. (ADV)





COOL NOVEMBER

Deluxe Room Only

Rp 488rb

nett/night

GRATIS WELCOME VOUCHER

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

Afternoon Tea



FREE

Ice Cream



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



DPRD PROVINSI KALTIM



Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fitri Maisyaroh

Fitri Maisyaroh Ajak Generasi Milenial Kenali Diri dan Kejar Sukses

BALIKPAPAN - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fitri Maisyaroh, menjadi pembicara dalam seminar character building yang bertema "Kenali Dirimu dan Kejar Suksesmu". Seminar ini diadakan di Hotel Mega Lestari, Samarinda, pada Rabu (15/11/2023) dan dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan milenial.

Dalam seminar tersebut, Fitri Maisyaroh mengatakan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencapai kesuksesan. Ia juga memberikan beberapa tips untuk mengenal diri sendiri,

seperti melakukan introspeksi, meminta masukan dari orang lain, dan mencoba hal-hal baru.

Selain itu, Fitri Maisyaroh juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas diri dengan cara belajar, berlatih, dan mengikuti kegiatan positif. Ia juga mengajak generasi milenial untuk selalu bersemangat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan.

"Semangat dan pantang menyerah harus selalu kita miliki," ucap Fitri Maisyaroh, yang juga merupakan penulis buku "Be A Good Person".

Peserta seminar mengaku terinspirasi dan termotivasi oleh materi yang disampaikan oleh Fitri Maisyaroh. Mereka berharap dapat menerapkan tips-tips yang diberikan oleh Fitri Maisyaroh dalam kehidupan sehari-hari.

"Seminar ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya jadi lebih tahu tentang diri saya sendiri dan apa yang harus saya lakukan untuk meraih sukses," kata Aulia, salah seorang peserta seminar. ([eky/adv/dprdkaltim](#))

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono

Sapto Sebut Serapan Anggaran 22 OPD Rendah, Pj Gubernur Beri Sinyal Mutasi Pejabat

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim dari Komisi II Sapto Setyo Pramono menyebut bahwa ada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 41 OPD yang serapan anggarannya tahun ini di bawah target. Ia meminta Pj Gubernur untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan reward dan punishment kepada OPD yang bersangkutan.

"Kira-kira mohon sesegera mungkin dilakukan evaluasi. Apakah ini serapan dikarenakan human, sistem atau seperti apa. Selalu munculnya di belakang soal keuangan ini, seperti Silpa, selalu muncul dibelakang," ujar Sapto pada interupsinya pada Rapat Paripurna ke-41, Kamis (17/11/2023) lalu.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara OPD dan DPRD, serta mengukur kinerja OPD dengan tolok ukur TPP yang jelas.

"Saya pikir penting untuk di evaluasi, yang mana betul-betul bekerja diberikan reward dan punishment. Tolak ukur TPP harus terukur, kinerja jelas, target apa, dapat apa dan apa yang mesti diselesaikan apa, mohon izin seperti itu Pak Pj Gubernur," tegas Sapto.

Menanggapi hal tersebut, Akmal Malik mengaku sudah mengetahui OPD mana yang seharusnya bisa melakukan akselerasi. Ia juga telah melakukan evaluasi atas kinerja OPD termasuk menghitung serapan anggaran rendah di OPD.

"Sebetulnya 15 hari sudah tahu mana OPD yang mana bekerja mana tidak," kata Akmal Malik.

Akmal Malik juga menegaskan ingin punya kaki kuat untuk pijakannya bekerja selama menjadi Pj Gubernur. Ia ingin akselerasi dan lari kencang, tetapi jika OPD tidak bisa seirama dengan visinya, ia tidak segan-segan

untuk mengganti pemimpinnya.

"Ketika saya lihat persoalannya tidak bisa seirama, saya ayun se-kaki ya pilihannya angkat kaki. Artinya di situ-situ saja, kita tidak akan non-job kan, kita putar mungkin karena tempatnya tak tepat," ungkapnya.

Akmal Malik menambahkan, sebagai jalan keluar agar kinerja OPD yang di bawah target meningkat, bisa saja dia melakukan mutasi antar kepala OPD. Ia berjanji tidak akan mengganggu kabinet Isran Noor (Gubernur Kaltim Periode 2018-2023) dan tidak akan ada pejabat yang di-nonjob-kan.

"Kalau mutasi antar kepala OPD, kan tidak ada yang kehilangan jabatan atau yang dinonjobkan," pungkasnya. ([eky/adv/dprdkaltim](#))

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Suharno, Anggota Komisi II DPRD Bontang.

Suharno Desak Pemkot Tingkatkan Promosi Wisata Bontang

BONTANG - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Suharno mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang agar segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Lantaran menurutnya, Wali Kota Bontang sudah menetapkan, bahwa Kota Bontang ditetapkan sebagai kota pariwisata.

"Kami masih membahas terkait dengan perkembangan pariwisata untuk ke depannya, dengan membentuk BPPD," ucapnya saat diwawancarai, Jumat (17/11/2023).

Dirinya sangat berharap, ke depannya Bontang bakal ada promosi yang memadai. Dimana pemkot harus gencar memasarkan wisata Bontang ke masyarakat luar, agar bisa mengetahui dan datang berkunjung ke Bontang.

"Kita ini memiliki tempat wisata yang sangat bagus, apalah artinya jika kita mempunyai destinasi yang bagus tetapi tidak diketahui oleh masyarakat luar," bebarnya.

Selama ini kegiatan wisata juga baru melibatkan warga lokal saja, inginnya mengundang warga dari luar sehingga bisa menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau warga luar yang datang, otomatis penginapannya, makannya sudah pasti di Bontang, jadi ini juga salah satu membantuperekonomian warga Bontang," ungkapnya.

Nantinya jika wisatanya di suatu daerah maju, itu karena adanya warga yang datang berkunjung. Selain memperkenalkan pariwisatanya, juga membangun Usaha Mikro Ke-

cil Menengah (UMKM) yang berada di Bontang.

"PAD ini ujung tombaknya adalah pariwisata, jadi gimana kita menjadikan Bontang sebagai kota pariwisata. Kita harus membuat perhatian khusus terkait ini," katanya.

Suharno juga menambahkan, untuk wisata di Malahing dan Tihi-Tihi sudah di program, karena di sana memang memiliki destinasi yang cukup bagus. Jika nantinya sudah dikelola, sangat yakin bukan hanya wisatawan nasional saja yang berdatangan, akan tetapi masyarakat dari negara luar bisa juga langsung datang ke Bontang.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki saat ditemui di ruangannya.

Peningkatan Jalan ke IKN Perlu Ditambah Penerangan Ideal

PPU - Lembaga legislatif, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta peningkatan aksesibilitas penghubung daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus ditingkatkan. Hal ini untuk semakin mendekatkan pembangunan antara pusat negara dan daerah penyenggangnya.

Khusus akses jalan, poros menuju IKN dari arah pusat PPU, mulai akhir tahun lalu telah ditingkatkan. Pun kini peningkatan terus dilakukan di beberapa titik jalan penghubung lainnya.

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki menuturkan apa yang dilakukan pemerintah dalam menyokong pemindahan IKN sudah sangat baik. Khusus untuk peningkatan akses ke IKN, ia menyebutkan peningkatan juga perlu dilakukan di sisi penerangan.

"Jalan poros dari Simpang Silkar Kelurahan Petung, Kecamatan Pena-

jam sampai Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah Kota Nusantara belum ada terpasang penerangan yang ideal," katanya, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, hal ini harus segera diperhatikan. Meninggkat mulai saat ini saja, mobilisasi pengguna jalan tersebut semakin masif.

"Termasuk jalan poros di Kecamatan Sepaku juga belum terpasang PJU, adanya PJU agar meminimalisir kecelakaan," tambahnya.

Tentu, sambung Hartono, ini juga berdampak pada masyarakat secara langsung. Gelapnya jalan itu, berpotensi membahayakan masyarakat yang melintas, ditambah banyaknya kendaraan besar yang juga menggunakan jalan yang sama.

"Dikhawatirkan jalan yang gelap mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau kriminalitas jalan,"

sebutnya.

Arus kendaraan yang melalui jalan simpang Silkar Kelurahan Petung menuju Kecamatan Sepaku, tembus kilometer 38 Kecamatan Sambaja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin meningkat. Sejalan dengan cepatnya proses pembangunan infrastruktur pendukung IKN.

Untuk itu, Hartono menegaskan pada pemerintah yang berwenang, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kaltim atau Pemkab PPU bahkan Otorita IKN, agar bisa memperhatikannya. Sebab, jika hal ini luput dari pembangunan yang dilakukan, maka masyarakat bisa dipastikan menanggung akibatnya.

"Penerangan jalan umum harus jadi perhatian pemerintah pusat, karena jalan poros itu merupakan jalan negara," pungkasnya. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor saat diwawancarai.

Ketua DPRD PPU, Dorong Pemkab Berantas Penyalahgunaan Narkoba di Pemerintahan

PPU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor meminta kepada Pemkab PPU untuk bertindak tegas. Untuk mendukung pemberantasan narkoba, termasuk yang ada di dalam tubuh pemerintahan.

Untuk diketahui, Pemkab PPU belum lama ini menggelar tes urine pada semua pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Hasilnya, ada beberapa pegawai yang tesnya menunjukkan hasil positif narkoba.

Atas kejadian ini, Syahrudin sangat menyayangkan adanya oknum beberapa pegawai disalah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga mendorong Pj Bupati PPU Makmur Marbun untuk memberikan

sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

"Artinya jika memang itu terbukti hasilnya positif. Saya kira harus ada regulasi tegas yang mengatur itu. Tinggal nanti Bupati memberikan sanksi seperti apa," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Ia menekankan kepada pemerintah daerah untuk menindak tegas penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan. Pun meminta untuk rutin melakukan tes urine bagi pegawai ASN maupun THL secara berkala.

"Kita juga secara nasional bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Kalau sampai terindikasi itu kesalahan dan harus ditindak tegas," kata Syahrudin.

Kemudian, tes urine ini juga harus

digelar secara merata di setiap OPD. Tak hanya pegawai, juga pada para legislator yang duduk di DPRD PPU.

"Jangan hanya di lingkup pemerintah di sana. Termasuk sekretariat DPRD PPU juga diperiksa. Termasuk saya, diperiksa. Tidak ada masalah," imbuhnya.

Lanjutnya, Syahrudin menyatakan sudah semestinya pemerintah melakukan penindakan secara tegas bagi pegawai yang terindikasi narkoba. Jika pemerintah tidak memberikan sanksi itu akan membuat citra pemerintah daerah dan pegawai menjadi buruk.

"Citra ASN akan menjadi buruk. Lingkungan pemerintah daerah harus bersih dari narkoba dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku," tutupnya. (ADV/SBK)



Elita Herlina saat menyerahkan hasil reses Fraksi Golkar DPRD Berau.

Hasil Reses Fraksi Golkar, Didominasi Permintaan Pemenuhan Infrastruktur

TANJUNG REDEB - Hasil reses Fraksi Golkar DPRD Berau didominasi permintaan pemenuhan infrastruktur dasar. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia memaparkan, Infrastruktur dasar yang dimaksud yakni, kebutuhan listrik 24 jam, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga jalan kampung yang masih belum bagus. Baik peningkatan jalan maupun pengaspalan jalan. "Itu sebagian prioritas kami di fraksi Golkar, selain pendidikan

dan kesehatan. Termasuk perhatian terhadap petani dan nelayan," ungkapnya.

Lanjutnya, hasil reses III masih sama dengan hasil reses pertama dan kedua. Meskipun, kali ini mendekati pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Dirinya tetap melakukan reses secara profesional dan fokus menyerap aspirasi dari masyarakat. "Saya rasa sama saja dengan reses sebelumnya. Kalau dikaitkan berbau politik saya rasa tergantung individu masing-masing

anggota dewan," tuturnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menilai, reses seharusnya menjadi salah satu wadah untuk menyaring kepentingan masyarakat lalu mempertanggungjawabkannya. Mengingat masa kampanye sudah dijadwalkan sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Ketika reses ya fokus menyerap aspirasi saja. Ketika kampanye berbeda lagi, itukan jadwalnya masih belum dimulai," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Tarik Minat Baca Masyarakat, Sarankan Adanya Inovasi Baru

TANJUNG REDEB - Untuk menarik minat baca masyarakat, Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melahirkan inovasi-inovasi baru.

Ia menuturkan, minat baca masyarakat menjadi suatu hal penting, terutama mengenai kualitas pengetahuan generasi muda agar menjadi lebih unggul dan cerdas. "Jika minat baca mereka tinggi, generasi muda juga bisa menambah wawasan terkait banyak hal yang mungkin tidak di dapatkan dalam pelajaran di sekolah," ujarnya.

Menurutnya, untuk melahirkan inovasi, OPD terkait dapat mencontoh provinsi lain yang berhasil dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Misalnya dengan mengembangkan perpustakaan daerah dengan konsep perpaduan ruang terbuka hijau. "Nah, konsep yang seperti ini biasanya menjadi magnet bagi masyarakat, mereka bisa membaca sekaligus bersantai di tempat yang teduh dan tidak membosankan," terangnya.

Kendati demikian, dirinya berharap minat baca generasi muda semakin meningkat, seiring dengan pemenuhan fasilitas penunjangnya. "Membaca sangat penting, karena banyak ilmu yang bisa didapatkan, pengetahuan dan wawasan akan semakin meningkat, tidak hanya memegang gadget terus," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

Perhatikan Pendidikan WBP

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mendorong pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan para Warga Binaan Permasyarakatan (WBP). Dia menerangkan, kesehatan dan pendidikan merupakan landasan utama untuk kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah daerah sudah seharusnya turut memperhatikan pendidikan dan kesehatan seluruh warganya, termasuk WBP," ungkapnya.

Dijelaskannya, perhatian kepada WBP yang bisa diberikan seperti pendidikan paket A, B dan C atau pendidikan penyetaraan. Dengan demikian, bekal bagi WBP akan bertambah dengan kebijakan pemerintah.

"Selain mendapatkan skill, ijazah tersebut bisa dipakai untuk mencari pekerjaan saat ke luar dari Rutan," tuturnya.

Selain itu, kata Falentinus, pemberian pendidikan juga sesuai yang tertuang dalam undang-undang, di mana pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. "Sebab warga binaan juga membutuhkan perhatian," tegasnya.

Politikus Demokrat ini membeberkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, mayoritas warga binaan di Rutan Tanjung Redeb merupakan masyarakat Berau.

"Sehingga pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pemberian pembinaan untuk pendidikan. Kalau bisa semuanya diberikan secara gratis," tutupnya. (adv/dez)

Atasi Permasalahan LPJU lewat PAD dari PLN

TANJUNG REDEB - Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menyebut permasalahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dapat diatasi lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PLN.

Dia mengungkapkan, PLN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengantongi pemasukan dari pembayaran pelanggan yang tiap bulannya mencapai Rp 20 miliar.

Dinilainya, dengan besaran dana tersebut, bukan hanya bisa menambah jumlah titik LPJU, tetapi sekaligus maintenance LPJU yang sudah ada di wilayah Kabupaten Berau.

“Kenapa tidak kita ambil dari PAD yang diberikan ke Pemkab Berau, itu untuk penambahan PJU yang masih sangat kurang. Apalagi dananya cukup besar,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini mendorong Pemkab Berau untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut, apalagi manfaat itu berdampak langsung untuk masyarakat.

“Titik rawan kecelakaan dan tindak kriminal di Berau disebabkan kurangnya PJU, khususnya pada malam hari. Saya harap segera dicarikan solusinya. Karena penerangan jalan selain mempermudah saat berkendara, juga menekan angka kriminal saat malam hari,” tutupnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

Ajak Masyarakat Bahu-membahu Tekan Kerawanan Pemilu 2024

TANJUNG REDEB - Menjelang Pemilu 2024, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengajak masyarakat untuk saling bahu-membahu menekan kerawanan terjadinya konflik. Ia menilai, Pemilu berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat dan kelompok. Dipaparkannya hal yang dapat timbul yakni isu-isu yang berkaitan dengan hoaks, money politic dan dinamika politik lokal.

“Konflik dapat merusak persatuan dan kesatuan, serta mengancam stabilitas dan keamanan. Untuk itu, kita semua harus bahu membahu menekan kerawanan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, masyarakat harus bersinergi menciptakan Pemilu yang damai dan aman. “Dan juga harus menjaga persaudaraan dan kebersamaan, serta menghormati pilihan dan hak suara masing-masing,” tuturnya.

Syarifatul menjelaskan, pemerintah dan legislatif harus bertanggungjawab mengelola aset daerah dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. “Pemerintah dan legislatif juga harus memberikan contoh yang baik dalam berpolitik dan berdemokrasi, serta tidak melakukan intervensi atau tekanan terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu,” katanya.

Para pihak pengawas pemilu, lanjutnya, harus bekerja secara objektif, kritis, dan tegas. Yang terpenting adalah menegakkan aturan dan hukum yang berlaku, serta menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dapat merugikan peserta dan pemilih. “Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas menjelang Pemilu 2024. Pemilu 2024 harus damai, aman dan demokratis,” pungkasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

DPMPTSP Lakukan SKM secara Internal dan Eksternal

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

Hasil SKM ini juga akan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penetapan kebijakan layanan. Sehingga kualitas dari penyelenggaraan layanan publik dapat terus ditingkatkan.

“Seperti yang kita ketahui, DPMPTSP merupakan salah satu instansi penyelenggara layanan publik,” jelas Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim.

Terdapat dua SKM yakni eksternal dan internal. Untuk eksternal menggunakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda diperoleh nilai 87,50, artinya kualitas pelayanan DPMPTSP Bontang adalah Baik. Nilai tersebut diperoleh dari total 265 responden.

“Tiap tahun ada survei, dengan surveyor lapangan itu mahasiswa Bontang secara manual, DPMPTSP tidak ikut serta. Jadi kami hanya menerima rilisnya saja,” ungkapnya.

Sedangkan internal, melalui aplikasi Perizinan Digital (PD) dan seluruh perizinan tidak dapat diproses sampai akhir sebelum mengisi SKM. Namun hasil tersebut hanya sebagai perbandingan dari hasil yang dikeluarkan pemerintah untuk diekspos ke masyarakat



Hasil survei diambil berdasarkan sembilan unsur layanan. Yaitu, penanganan pengaduan, kesesuaian/kewajaran biaya, perilaku petugas pelayanan, kompetensi petugas, prosedur pelayanan, kesesuaian pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian persyaratan, dan kualitas sarana dan prasarana. **(Sya/adv)**

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari

An advertisement for Toyota Motor Oil. At the top left is the Toyota logo and "LET'S GO TOGETHER". At the top right is the "Bontang" logo. The main text reads "SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN" and "TOYOTA MOTOR OIL". Below this is "Khusus Taxi Online & Travel". A central graphic shows a mechanic pouring oil into an engine, with a large yellow seal that says "GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE". On the right, a red and white taxi is shown. In the foreground, a smiling male mechanic in a white and red uniform is visible. At the bottom left, it says "Informasi - Call/WA : Adi S : 0822-5435-0088". At the bottom right, there is an "AUTO 2000" logo with "member of ASTRA" below it. The bottom of the ad features the slogan "Drusian Toyota lebih mudah!" and the word "Bontang" in the bottom right corner.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Sutanto saat konferensi pers pengamanan perempuan diduga terlibat praktik prostitusi, beberapa waktu lalu.

Satpol PP PPU Dukung Pemberantasan Praktik Prostitusi di Kawasan IKN

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara mendukung pemberantasan praktik prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Seiring dengan tumbuhnya berbagai usaha yang berhubungan dengan salah satu penyakit sosial di masyarakat itu.

Tekad memberantas prostitusi tersebut, sebagai bentuk kehadiran Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam menjaga ketenteraman, dan ketertiban umum (Trantibum). Penerapan regulasi berupa Perda 10/2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Penajam Paser Utara, harus dikawal dengan tindakan tegas.

"Kami berupaya memberantas

prostitusi terselubung di warung remang-remang maupun daring," kata Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Susanto, Jumat (17/11/2023).

Untuk diketahui, Satpol PP sebelumnya pernah mengamankan empat perempuan asal luar PPU. Yakni perempuan asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Balikpapan yang melakukan praktik prostitusi dari laporan masyarakat.

"Praktik prostitusi dilakukan melalui aplikasi daring untuk mendapatkan pelanggan dan satu wanita mengaku dalam dua hari melayani tujuh pelanggan," jelasnya.

Selanjutnya, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap empat perempuan tersebut. Serta mendalami un-

tuk mengantisipasi adanya jaringan perdagangan orang atau ada koordinator dari praktik prostitusi itu.

Terlepas dari itu, pengelola penginapan maupun hotel juga diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan dan menerapkan tata tertib. Agar penggunaan penginapan maupun hotel sesuai kaidah, bukan diperuntukkan bagi kegiatan prostitusi.

"Penanganan berbagai praktik prostitusi tidak hanya bisa dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum saja, warga juga harus turut serta menanggulangi perilaku atau kegiatan tersebut," pungkas Margono. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Para personel Satpol PP PPU saat apel.

Ratusan THL Personel Satpol PP PPU Tunggu Kepastian Status

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih menunggu kepastian kejelasan status. Sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat yang akan menghapus status pegawai tenaga harian lepas (THL).

Setidaknya ada sekira 104 anggota Satpol PP PPU yang masih berstatus THL atau biasa disebut honorer. Mereka meminta kejelasan nasibnya untuk diangkat statusnya menjadi PNS.

"Ini bukan hanya perjuangan Satpol PP PPU saja. Melainkan perjuangan Satpol PP di seluruh Indonesia," ucap Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Sutanto, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, Satpol PP merupakan

penegak aturan dengan tupoksi masing-masing dan langsung berurusan dengan masyarakat. Yakni ketentraman, Ketertiban umum (trantibum) sebagai penyelenggara tugas Negara.

Sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah setuju untuk honorer diangkat menjadi PNS. Hanya saja penentunya bukan Kemendagri, melainkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Itulah yang menjadi harapan kawan-kawan di Satpol PP yang sudah lama mengabdikan," ucapnya.

Opsi lainnya ialah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K. dirinya juga mendapat informasi bahwa memang mengarah kesana. Bisa jadi misalnya nanti kedepannya, status atau golongan P3K dapat diperbolehkan kembali. Misalkan untuk menjadi penyidik disertai regulasi-regulasinya, tentu mengikuti.

"Pada prinsipnya Kami mendukung setiap program pemerintah, yang penting mereka itu memiliki kejelasan status. Jangan sampai mereka honorer terus. Mereka juga memiliki resiko kerja yang tinggi. Kalau mereka statusnya masih tidak jelas, kan kasian juga. Apalagi dia menjalankan tugas Negara," pungkas Margono. (ADV/SBK)





ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Para personel Satpol PP PPU bersama petugas Bawaslu PPU saat melakukan penertiban baliho beberapa waktu lalu.

Satpol PP PPU Pantau Baliho Kampanye Tak Sesuai Aturan

PPU - Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) juga terus melakukan monitoring lingkungan sosial jelang masa Pemilu 2024. Salah satu yang menjadi fokusnya ialah bertebarannya spanduk dan baliho kampanye.

Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Sutanto menuturkan telah beberapa kali menertibkan spanduk atau baliho, bakal calon peserta Pemilu 2024 mendatang. Hal itu karena mengganggu estetika kota, pun karena belum masuk tahapan

kampanye.

"Penertiban sudah dilakukan sejak September lalu, mulai dari Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Upaya penertiban juga dilakukan secara rutin yakni tiga hingga empat kali dalam seminggu. Pun personel disiagakan di beberapa titik yang kerap dipasang.

"Kami tertibkan bertahap, mungkin karena saking banyaknya, tenaga Kami kewalahan. Hari ini dicabut

besoknya ada lagi," ungkapnya.

Margono menjelaskan spanduk atau baliho tersebut kata dia banyak yang dipasang di fasilitas umum, juga ada yang dipasang di pohon. Tidak hanya merusak estetika kota, tetapi hal itu juga dianggap melanggar Perda ketertiban umum.

"Kami tidak melihat spanduk caleg atau apapun selama itu melanggar Perda ketertiban umum, kita cabut," tutup Margono. (ADV/SBK)



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com

Kini Warga Mentawir Bisa Nikmati Air Bersih dari AirNav

BALIKPAPAN-Hidup bertahun-tahun lamanya hingga beranak cucu, ratusan masyarakat di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sulit untuk mendapatkan air bersih bagi kehidupannya sehari-hari. Padahal, kawasan ini merupakan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana masyarakatnya bisa memperoleh air bersih dari air hujan atau membelinya dari depo pengisian air yang jaraknya paling dekat 9 kilometer.

Ketua Adat, Sahnun mengatakan, dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat di Kelurahan Mentawir hanya bergantung dari aliran sungai yang ada. Mulai dari MCK, masak hingga konsumsi.

"Semua pakai air sungai itu. Kalau mau air bersih ya tunggu hujan. Tapi kan sudah ada 4 atau 5 bulan di sini nggak ada hujan. Atau kalau mau ya beli di luar sana, tapi jauh sekali," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Senada dengan Sahnun. Warga RT 4 Kelurahan Mentawir, Ria Andini mengatakan, bahwa dirinya hanya menggunakan air sungai yang dikelola oleh para warga. Dan jika ingin memiliki air bersih, harus membelinya dulu dengan jarak yang cukup jauh dan harga relatif mahal.

"Warga di sini ya sehari-harinya mengandalkan air yang dari sungai itu. Disodot pakai pompa, dan dibagi ke rumah-rumah warga," jelasnya.

Jika ingin menjadi air konsumsi, Ria mengaku air tersebut harus di endapkannya selama dua sampai tiga hari dulu. "Ia kita harus diamkan dulu itu airnya. Kalau nggak ya masih kuning dan bau. Tapi kalau mandi sama cuci baju aja bisa langsung," tambahnya.

Terkait hal tersebut, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebagai BUMN yang memberikan layanan navigasi penerbangan di Indonesia, ikut mendukung komitmen pemerintah untuk memperbaiki lingkungan serta peningkatan target akses sanitasi dan air bersih yang berkelanjutan khususnya di wilayah IKN dan sekitarnya.

Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi TJSL AirNav Indonesia, Mario Hendrawan mengatakan, melalui Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) berkomitmen untuk mem-

berikan akses air bersih bagi masyarakat Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Program TJSL AirNav Indonesia untuk Kelurahan Mentawir meliputi pembangunan fasilitas mesin pengolahan air payau menjadi air mineral siap minum, dengan bangunan pelindung permanen sejumlah 1 unit," ujarnya.

Fasilitas ini dibangun di Kantor Lurah Mentawir dan akan dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG), yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

"Kelurahan Mentawir merupakan

salah satu wilayah yang akan menjadi bagian dari IKN. Namun, hingga saat ini, jaringan PDAM belum masuk ke wilayah tersebut. Pasokan air bersih hanya berasal dari sungai dan embung, yang kualitasnya rendah," jelasnya.

Program TJSL AirNav Indonesia untuk Kelurahan Mentawir yang merupakan program prioritas BUMN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain menjamin ketersediaan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi beban ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi TJSL AirNav Indonesia, Mario Hendrawan saat meresmikan depo air bersih di Kelurahan Mentawir.





Ditlantas Polda Kaltim, Bapenda Balikpapan dan PT Jasaraharja menggelar razia pajak kendaraan di kawasan Balikpapan Baru, Jumat (17/11).

Ratusan Kendaraan di Balikpapan Terjaring Razia Pajak Kendaraan

BALIKPAPAN - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Balikpapan dan PT Jasa Raharja menggelar razia pajak kendaraan di kawasan Balikpapan Baru, atau tepatnya di Jalan Tjutjup Suparna, Jumat (17/11/2023).

Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan, melalui Kasub Bin Ops Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Bangun mengatakan, razia ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran pajak kendaraan.

"Razia ini didukung armada bus Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) keliling di lokasi. Kami bersama tim gabungan melakukan penertiban dan imbauan," ujarnya.

Lebih lanjut Bangun menjelaskan, dari giat razia ini hasilnya sebanyak 697 pengendara terjaring razia gabungan tersebut. Dari 697 unit pengendara yang terjaring diantara-

nya, sepeda motor atau R2 sebanyak 557 unit dan mobil atau R4 sebanyak 140 unit.

"Kendaraan Bermotor (KB) di Kaltim sebanyak 57 unit terdiri dari 50 unit R2 dan 7 unit R4, kendaraan dari luar Kaltim sebanyak 7 unit terdiri dari 3 unit R2 dan 4 unit R4. Dari hasil razia tersebut sebanyak 15 unit kendaraan bermotor membayar pajak kendaraannya dengan total Rp 4.700.000 melalui layanan Samsat Bus Keliling," jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD PPRD Bapenda Balikpapan, Said Ahmad Cyrus Halib mengatakan, terdapat puluhan pengendara yang terjaring razia, dan didominasi oleh roda dua yang terjaring dalam razia ini.

"Mereka yang didapati belum membayar pajak kendaraannya langsung diarahkan untuk membayar ke bus Samsat keliling," ujarnya.

"Bagi yang tidak memiliki dana, dilakukan pendataan dan diberikan

surat untuk pembayaran selanjutnya," tambah Said Ahmad.

Said Ahmad menjelaskan, razia ini tidak sekadar menegakkan kewajiban membayar pajak, tetapi juga sebagai bagian dari sosialisasi terkait pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.

"Pembayaran pajak memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan daerah. Sebagai insentif, program Pemutihan atau Relaksasi Pajak berlangsung hingga 28 Desember 2023 mendatang, dengan tujuh poin pemutihan, termasuk pembebasan denda PKB dan BBNKB, diskon bagi pembayaran tepat waktu, dan diskon bagi penunggak pajak dengan durasi tertentu," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

Bawaslu Balikpapan Tertibkan Ratusan Alat Peraga Sosialisasi

BALIKPAPAN - Dalam rangka menjaga integritas dan kondisivitas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan bekerjasama dengan Satuan Polision Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan guna menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) berupa baliho atau spanduk yang melanggar aturan berlaku.

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Wasanti mengatakan, tindakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan proses sosialisasi partai politik peserta pemilu berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"PKPU mengatur jadwal kampanye Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Bawaslu Kota Balikpapan mencatat sebelum penetapan DCT terdapat 673 APS yang melanggar ketentuan PKPU," ujarnya, Jumat (17/11/2023).

Lebih lanjut Wasanti menjelaskan, dari 637 APS yang melanggar di antaranya terdapat di Balikpapan Selatan sebanyak 131 APS, Balikpapan Utara sebanyak 110 APS, Balikpapan Timur sebanyak 167 APS, Balikpapan Tengah sebanyak 166 APS, Balikpapan Kota

sebanyak 37 APS dan Balikpapan Barat sebanyak 62 APS.

"Bawaslu RI telah menerbitkan Imbauan Nomor 774/PM/K1/10/2023 yang menyatakan selain Partai Politik Peserta Pemilu, Bacaleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat melakukan sosialisasi berupa pemasangan baliho atau spanduk atau sejenisnya namun dengan ketentuan tidak memuat unsur ajakan atau unsur kampanye dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Adapun APS yang dilarang berupa reklame, spanduk dan atau umbul-umbul yang paling sedikit memuat visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Berisi ajakan untuk memilih peserta pemilu. Ditempatkan di lokasi-lokasi yang dilarang sesuai peraturan berlaku.

Wasanti menambahkan, berdasarkan data penertiban APS yang sedang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Balikpapan, angka ini tentunya akan terus bergerak meningkat, mengingat Bawaslu Kota Balikpapan bersama tim terpadu akan terus melakukan proses penertiban sampai dengan 27 November 2023.

"Temuan ini menunjukkan, sejauh ini ter-

dapat peningkatan jumlah sebaran APS sebesar 26 persen pasca penetapan DCT dibandingkan dengan hasil inventarisir jajaran pengawas yang dilakukan sebelum penetapan DCT sejumlah 673 APS tersebar di Kota Balikpapan," tambahnya.

Dalam rangka melakukan pendataan persebaran APS berupa baliho atau spanduk melanggar yang tersebar di Bawaslu Kota Balikpapan, Jajaran Bawaslu Kota Balikpapan, Panwaslu Kecamatan hingga PKD di Kota Balikpapan telah melakukan inventarisir persebaran APS melanggar di Kota Balikpapan.

Selain itu Bawaslu Balikpapan telah berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan, Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Satpol PP Kota Balikpapan, DP-MPTSP dan BPPDRD Kota Balikpapan terkait penertiban APS.

"Hasil dari koordinasi tersebut Bawaslu Balikpapan memberikan rekomendasi atas hasil Inventarisir APS kepada pihak Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Satpol PP Kota Balikpapan yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Wigeno Arasana No. 1166, Sekeloa Baru, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



ISTIMEWA

Launching program wolbachia di Bontang September 2023 lalu.

Program Wolbachia Berbahaya? Begini Tanggapan Kadinkes Bontang

BONTANG - Program pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan teknologi Wolbachia kini sedang menjadi sorotan publik. Isu inipun mendapat tanggapan dari Kepala Dinkes (Kadinkes) Bontang, drg Toetok Pribadi Ekowati.

Diketahui Bontang menjadi salah satu kota sebagai daerah ujicoba teknologi wolbachia ini bersama Jakarta Barat, Bandung, Semarang, dan Kupang. Sebelumnya, metode wolbachia ini sudah diujicobakan di Yogyakarta.

Dikatakan drg Toetok, bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merilis program wolbachia tersebut. Pihaknya sudah memberikan pemahaman ke masyarakat, sehingga masyarakat siap sebelum program tersebut dirilis.

"Kami sudah sosialisasi dan pahami masyarakat. Masyarakat sudah siap sebelum aplikasi di lapangan. Alhamdulillah masyarakat paham dan mendukung," ujarnya singkat.

PERS RELEASE KEMENKES RI

Guna mendukung argumennya tersebut, drg Toetok menambahkan pers release yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta tertanggal 13 November 2023 berjudul 'Inovasi Wolbachia Efektif Turunkan Kasus DBD'. Diketahui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

Dijelaskan, bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan inovasi teknologi wolbachia untuk menurunkan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Teknologi Wolbachia merupakan salah satu inovasi yang melengkapi strategi pengendalian yang berkasnya sudah masuk ke Stranas (Strategi Nasional).

Sebagai pilot project, dilaksanakan di 5 kota yaitu Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang dan Kota Bontang berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyeleng-

garan Pilot project Implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan dengue.

Selain di Indonesia, Pemanfaatan teknologi Wolbachia juga telah dilaksanakan di negara lain (Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Mexico, Kiribati, New Caledonia, Sri Lanka) terbukti efektif untuk pencegahan dengue.

Efektivitas wolbachia telah diteliti sejak 2011 yang dilakukan oleh WMP di Yogyakarta dengan dukungan filantropi yayasan Tahija. Penelitian dilakukan melalui fase persiapan dan pelepasan aedes aegypti berwolbachia dalam skala terbatas (2011-2015).

Wolbachia ini dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk aedes aegypti, sehingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Jika aedes aegypti jantan berwolbachia kawin dengan aedes aegypti betina maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblokir. Selain itu, jika yang berwol-

bachia itu nyamuk betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia maka seluruh telurnya akan mengandung wolbachia.

Sebelumnya uji coba penyebaran nyamuk ber-Wolbachia telah dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2022. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar Wolbachia terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77 persen, dan menurunkan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani juga menegaskan adanya penurunan penyebaran Dengue yang signifikan setelah adanya penerapan Wolbachia.

"Jumlah kasus di Kota Yogyakarta pada bulan Januari hingga Mei 2023 dibanding pola maksimum dan minimum di 7 tahun sebelumnya (2015 - 2022) berada di bawah garis minimum," terang Emma

"Masyarakat pada awalnya memang ada kekhawatiran karena pemahaman dari masyarakat itu

nyamuk ini dilepas kok bisa mengurangi (DBD). Tapi seiring berjalan dan kita sudah ada edukasi, ada sosialisasi, sekarang masyarakat justru semakin paham, bahwa sebenarnya teknologi ini untuk mengurangi DBD," papar Sigit Hartobudiono, Lurah Pantangpuluhan Yogyakarta

Kendati demikian, keberadaan inovasi teknologi Wolbachia tidak serta merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk melakukan gerakan 3M Plus seperti Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

PROGRAM WOLBACHIA DITOLAK MANTAN KEMENKES RI

Di sisi lain, mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari dengan tegas menolak penyebaran nyamuk bionik Wolbachia.

"Penyebaran nyamuk Wolbachia ini membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan

penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan rakyat Indonesia. Segera hentikan!" ujar Siti Fadilah Supari.

"Ini seperti mengorbankan rakyat kita untuk menjadi kelinci percobaan, hal ini tidak dapat diterima. Siapa yang akan bertanggung jawab atas resiko-resiko yang mungkin muncul," pungkas Siti Fadilah Supari saat konferensi pers.

Pada hari Minggu (12/11), "Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia" menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait adanya program Pemerintah berupa penyebaran telur nyamuk Aedes Aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia dalam jumlah jutaan.

Acara tersebut tak hanya dihadiri oleh Mantan Menkes RI Siti Fadilah, melainkan banyak pembicara lainnya seperti Komjen Pol Drs Dharma Pongrekun SH MM MH, Mirah Sumirat SE (Presiden ASPEK Indonesia) dan Dr Ir Kun Wardana Abyoto, MT.

Penulis/Editor: Yusva Alam



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



Kode Promo
BTSOLI

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku





Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang

50 Aparat Gabungan Gelar Patroli, Sukseskan Rangkaian Pemilu 2024

KUTAI BARAT - Sebanyak 50 aparat gabungan dari Polres Kutai Barat, Kodim 0912/Kutai Barat dan Satpol PP melaksanakan patroli di sejumlah wilayah di Sendawar. Pada Kamis (16/11/2023) malam sekira pukul 21.00 Wita, seluruh tim gabungan terlihat berpakaian lengkap dengan menggunakan armada Pengendalian Massa (Dalmas).

Kapolres AKBP Heri Rusyaman melalui Kabag Ops Polres Kubar AKP Emanuel Teguh Budi Santoso mengungkapkan aparat gabungan tiga pilar tersebut melaksanakan patroli rutin dalam menjaga cipta kondisi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Kabupaten Kutai Barat.

"Kegiatan preventif ini bertujuan sebagai upaya Polri agar terciptanya suasana dan kondisi yang aman, damai pada menjelang Pemilu 2024, khususnya dalam wilayah hukum Polres Kutai Barat," terangnya, Jumat, (17/11/23).

Kabag Ops menjelaskan, kegiatan patroli preventif tiga pilar yang dilaksanakan ini dimulai dengan mengunjungi kantor Bawaslu yang ada di Kelurahan Simpang Raya. Kemudian



Kabag Ops Polres Kutai Barat AKP Emanuel Teguh Budi Santoso saat menemui security Bawaslu Kubar yang bertugas malam bari.

Kantor KPU, lalu mendatangi tempat-tempat berkumpulnya masyarakat sekaligus memberikan imbauan.

"Kegiatan cipta kondisi gabungan tiga pilar ini adalah salah satu tugas Polri dalam rangka mensukseskan rangkaian Pemilu 2024," ujarnya.

Kabag Ops menambahkan, adapun aparat gabungan tiga pilar tersebut terdiri dari, 30 personel Polres Kubar, 10 personel TNI Kodim 0912/Kubar dan 10 personel dari Satpol PP

Kutai Barat.

Untuk diketahui, kegiatan patroli tiga pilar ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Kubar AKP Emanuel Teguh Budi Santoso didampingi Kasat Samapta AKP Costa Siahaan, Paurmin Bag SDM IPDA Sugiharto, dan Paur Subbag Sekpal Polres Kutai Barat IPDA Polner Tobing.

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari

SMKN 1 Sendawar Jadi Tuan Rumah Lomba Bakat Tingkat SMK Se-Kutai Barat

KUTAI BARAT - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur cabang Wilayah IV yang membawahi Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu bakal menggelar lomba minat, bakat, dan kreativitas jenjang SMK se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.

Kegiatan itu mengangkat tema "Kita Tingkatkan Sikap Sportivitas dan Silaturahmi dalam Mencegah Perundungan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pelajar".

Kepala Sekolah SMKN 1 Sendawar selaku Ketua Panitia M. Noor Tazeli mengungkapkan, Disdikbud Kaltim Wilayah IV yang membawahi dua

Kabupaten yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu menunjuk SMKN 1 Sendawar menjadi tuan rumah sekaligus panitia pelaksanaan dalam kegiatan lomba tersebut.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, pada 18-19 November 2023. "Lomba ini akan dibuka pada hari Sabtu sekira pukul 08.00 Wita dan akan ditutup pada hari Minggu," terang Tazeli kepada Media Kaltim, Jumat (17/11/2023).

Tazeli menambahkan, kegiatan ini akan diikuti sebanyak 14 SMK yang terdiri dari 7 SMK Negeri dan 7 SMK Swasta yang ada di wilayah

Kutai Barat.

"Tiap sekolah mengirimkan masing-masing siswa dan siswinya berjumlah 21 orang termasuk pendampingnya. Jadi total keseluruhan ada 294 orang," ujarnya.

Adapun lomba yang akan dilaksanakan di antaranya, lomba baca puisi perorangan, lomba pidato perorangan, berbalas pantun perorangan, games Mobile Legends berkelompok yang mana per kelompok terdiri dari 5 orang. Selanjutnya, yang terakhir lomba desain poster perorangan.

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Dari kiri, pewarta RRI Boy, Pewarta Tribun Kaltim Fairus, Pewarta Media Kaltim Andi Desky, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Founder Kalimantan Rusdi, dan Pewarta Samarinda Pos Risky.

Penyelenggara 'Semangka untuk Gaza', Serahkan Tanda Apresiasi kepada Pj Gubernur Kaltim

SAMARINDA - Penyelenggara kegiatan penggalangan dana dan solidaritas Palestina 'Semangka untuk Gaza', menyerahkan plakat tanda apresiasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, yang telah berkontribusi terhadap kegiatan tersebut.

Selain menyerahkan plakat, pihak pemrakarsa yang mayoritas merupakan jurnalis ini, menyerahkan buku berjudul 'Perang di Samarinda' karya sejarawan Kaltim M.Sarip yang merupakan buku yang dijual di gelaran Semangka untuk Gaza.

Perwakilan penyelenggaran, Andi Desky yang sekaligus pewarta Media kaltim.com menyampaikan bah-

wa penyerahan ini sekaligus mempererat silaturahmi dengan pria kelahiran Sumatera Barat tersebut.

"Pagi tadi Pak Pj Gubernur menggelar Coffee Morning dengan awak media. Jadi sekalian kami memberikan tanda apresiasi dan terima kasih dari kontribusi beliau di kegiatan kami," ungkapnya.

Andi membeberkan, bahwa tak hanya Pj Gubernur Akmal Malik yang berkontribusi dalam kegiatan amal tersebut. Ia menyatakan bahwa sejumlah pihak dan beberapa tokoh turut memberikan andil dan dukungannya.

"Memang dukungan dari sejumlah pihak di luar ekspektasi saya pribadi. Dan kami rencana akan roadshow

memberikan tanda apresiasi ini, sekaligus melaporkan hasil kegiatan dan tentu saja mempererat silaturahmi," tandasnya.

Sementara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, dukungan yang diberikannya pada kegiatan 'Semangka untuk Gaza' merupakan bentuk komitmennya untuk bersinergi dan membangun kemitraan dengan sejumlah pihak salah satunya jurnalis.

"Selama ada jadwal kosong tidak berbenturan agenda pemerintahan saya siap jika diundang. Nanti kita buat yang lebih besar lagi," pungkasnya. (RIs)

Editor : Nicha Ratnasari

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballkpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982



Nomor 2 dari Kiri : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal , Manager Area Samarinda Media Kaltim, Adhi Abdian dan tim redaksi Media Kaltim.

Diskominfo Kaltim Dorong Media Lokal Menuju Tingkat Nasional

SAMARINDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal berharap media lokal di Kaltim dapat menjadi media nasional jika Infrastruktur Komunikasi Nusantara (IKN) nantinya pindah ke Kaltim.

Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara Coffee Morning yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, serta wartawan dan pimpinan media se-Kaltim pada Jumat (17/11/2023), untuk memperkuat posisi media lokal di tingkat nasional.

"Media di Kaltim harus mempersiapkan diri agar nanti mampu bersaing dengan media nasional,

dengan cara harus menjadi media nasional," ujarnya.

Menurut Faisal, media lokal di Kaltim harus bersiap-siap dan tidak hanya bermain di tingkat provinsi. Jika media lokal tidak memenuhi standar menjadi media nasional, maka harus siap menerima konsekuensi bahwa media nasional dari Jakarta akan mengirimkan wartawannya ke IKN di Kaltim.

Faisal juga menekankan bahwa keuntungan bagi media lokal di Kaltim adalah keberadaan mereka di wilayah Kalimantan yang memiliki kekayaan alam yang unik. Oleh karena itu, media lokal diharapkan sudah lebih siap dan mampu bersaing dengan media nasional.

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa jika media nasional atau brandnya nasional hadir di Kaltim, wartawannya sebaiknya berasal dari orang-orang Kaltim. Hal ini akan memberikan keuntungan dalam memahami kondisi lokal dan memperkuat identitas media nasional di wilayah tersebut.

"Kami berharap media lokal di Kaltim dapat terus berkembang dan menjadi media nasional yang mampu memberikan informasi yang berkualitas serta mewakili identitas dan kekayaan Kalimantan Timur," tutupnya.

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Selamat dan Sukses

ATAS TERPILIHNYA

DRA. SRI WAHYUNI, M.PP

*sebagai ketua umum
Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia*

Masa Jabatan 2023-2026

